

Judul : Demokrat Setuju Ada Revisi Setelah Ketuk Palu: Perppu Ormas Makin Terbuka Disahkan Jadi Undang-Undang
Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Demokrat Setuju Ada Revisi Setelah Ketuk Palu

Perppu Ormas Makin Terbuka Disahkan Jadi Undang-Undang

DPR belum satu suara menyikapi terbitnya Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas. Namun, peluang Perppu itu akan diterima menjadi undang-undang terbuka lebar. Hal ini setelah Fraksi Demokrat mengungkapkan kemungkinan menyetujui Perppu yang digunakan Pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut.

SAAT INI, Perppu tersebut tengah dibahas di Komisi II DPR. Sebelumnya, peluang Perppu tersebut untuk dapat diterima menjadi Undang-Undang masih 50:50. Parpol yang sudah solid mendukung Perppu itu baru PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Sedangkan PKB dan PPP, walaupun masuk ke dalam partai pendukung Pemerintah, belum menyatakan sikap secara pasti. Sementara, Gerindra dan PKS, yang merupakan partai oposisi jelas menolak Perppu itu. Kini, dengan kecondongan Demokrat, dukungan terhadap persetujuan Perppu itu akan menjadi mayoritas di DPR.

Sikap Demokrat itu memang tidak disampaikan secara terang. Petinggi Fraksi Demokrat DPR Syarif Hasan menyatakan, pihaknya masih melakukan analisis dan kajian secara menyeluruh terhadap Perppu itu sebelum menentukan sikap. "Kami masih pelajari secara saksama, tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Kami harus telaah dengan baik," katanya di Gedung DPR, Senayan, kemarin.

Eks Menteri Koperasi dan UKM hanya memastikan, fraksinya akan berupaya se-dapat mungkin keputusan yang diambil betul-betul tepat

bagi bangsa. Pihaknya tidak ingin keputusan yang diambil malah menjadi kontroversi di masyarakat, mengingat Perppu itu sebelumnya sudah memantik pro dan kontra.

"Yang menjadi kontroversi di masyarakat itu kan salah satunya terkait mekanisme pembubaran. Pada dasarnya pembubaran itu harus ada peringatan, terus diperbaiki. Ini unsur pembinaan. Kami tekankan di situ," jelasnya.

Namun begitu, kata Syarif, kemungkinan pihaknya menerima Perppu itu masih terbuka. Syaratnya, jika sudah diterima nanti, Undang-Undang dari hasil Perppu tersebut harus segera direvisi, khususnya mengenai pasal proses peradilan dalam pembubaran Ormas.

Baginya, revisi ini hal yang wajar. Sebelumnya, banyak Perppu yang disahkan DPR langsung direvisi. "(Revisi) itu sering dilakukan di DPR. Perppu diterima terus langsung diajukan

RUU untuk direvisi secara menyeluruh," tambah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Dalam kesempatan terpisah, Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengaku telah mengusulkan sejumlah Ormas untuk dipertimbangkan diundang dalam rapat pembahasan Perppu di Komisi II. Usulan ini disampaikan sesuai jatah bahwa setiap fraksi dapat mengundang empat perwakilan ke dalam rapat pembahasan Perppu Ormas. "Tiap partai dapat mengundang empat perwakilan dari Ormas, pengamat, akademisi, dan pihak lain yang dianggap perlu," kata anggota Komisi II ini.

Setelah ditotal, kata Mardani, ada 15 Ormas yang dapat dipertimbangkan untuk diundang dalam rapat bersama Komisi II. Baginya, pertemuan dengan 15 Ormas ini sangat penting untuk mendengar masukan maupun aspirasi terhadap terbitnya Perppu tersebut.

Untuk pembahasannya,

kata Mardani, akan dilakukan pada bulan ini. Hal itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di Komisi II. "Kami berupaya maraton mendengar aspirasi masyarakat tentang Perppu Ormas yang diterbitkan Pemerintah di Oktober ini," jelas Mardani.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate menyekur agar semua partai mendukung terbitnya Perppu tersebut. Kata dia, langkah Pemerintah menerbitkan Perppu tersebut sudah tepat sebagai upaya mencegah adanya pihak-pihak yang berupaya mengubah ideologi bangsa.

"Kita berada dalam konstelasi politik yang perubahan ideologi begitu cepatnya bisa terjadi. Serangan-serangan terhadap ideologi negara di banyak negara saat ini terjadi. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Makanya, kehadiran Perppu itu perlu didukung semua partai," ucap Johnny. ■ KAL